

## MODEL PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS PARTISIPASI PENGGUNA

Asrori✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 4 November 2008. Disetujui: 3 Desember 2008. Dipublikasikan: Maret 2009

---

### Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan suatu model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang berbasis pada partisipasi pengguna terhadap peningkatan efektivitas, akuntabilitas efisiensi, dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan responden kepala, bendahara, dan staf keuangan SKPD sebanyak 52 responden. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi menunjukkan bahwa partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan penggunaan teknologi tepat guna memiliki pengaruh positif terhadap sistem akuntansi pemerintah daerah. Sebaiknya pengembangan model akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada keterlibatan partisipasi pengguna.

### Abstract

*The research aims to find a model of local government accounting system development, based on user participation to the increase of effectiveness, efficiency, accountability and performance of local financial management. This research is population research with 52 respondents. They includes head, treasurer, and finance staff of SKPD. The finding shows that empirically the users participation, and the use of appropriate technology have positive influence to the local government a-counting system. The model of local government accounting development which is based on user participation should be recommended for increasing the local financial management performance.*

© 2009 Universitas Negeri Semarang

**Keywords:** *local government; public finance; accounting system*

---

### Pendahuluan

Diterbitkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilengkapi dengan petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diharapkan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga keandalan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian sampai sekarang masih ditemukan beberapa permasalahan pengelolaan keuangan daerah dalam skala nasional, diantaranya adalah: Pertama, keterlambatan penyampai-

an data keuangan dari daerah ke pusat, mengakibatkan penyajian data keuangan daerah secara nasional untuk kepentingan merumuskan kebijakan fiskal terlambat dari jadwal yang direncanakan. Kedua, ketidakseragaman input data keuangan dari daerah baik dalam hal kode rekening maupun format laporan keuangannya, sehingga menyulitkan kompilasi dan konsolidasi database keuangan daerah yang harus disajikan sebagai satu kesatuan laporan keuangan sektor publik (lihat Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, 2006).

Seiring dengan perkembangan sistem informasi berbasis teknologi (komputer) yang telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi (entitas) guna memenuhi berbagai tuntutan efektifitas, efisiensi, produktivitas dan kualitas pelayanan (Scott, 1999). Untuk meningkatkan kinerja penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan khususnya di lingkungan satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Demak telah diimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi (komputer). Namun demikian dari hasil observasi pendahuluan terungkap, ketersediaan sistem akuntansi pemerintahan daerah belum dapat digunakan secara optimal oleh para pejabat, bendahara dan staf keuangan SKPD untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya.

Menurut Bodnar & Hopwood (1995) ada tiga elemen utama yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan implementasi sistem akuntansi berbasis teknologi (komputer), yaitu: (a) Perangkat keras (*hardware*), (b) Perangkat lunak (*software*), dan (c) Pengguna (*brainware*). Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam setiap pengembangan sistem informasi berbasis teknologi, selain dipertimbangkan aspek-aspek teknis perangkat keras dan perangkat lunaknya, hendaknya dipertimbangkan pula aspek-aspek perilaku penggunanya. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada salah satu aspek penting perilaku pengguna yang menentukan keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen berbasis teknologi adalah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi (Swanson, 1974; Baroundi *et al.*, 1986; Olson & Ives, 1980).

Berpijak pada uraian-uraian latar belakang di atas, permasalahan mendasar yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah? Untuk menjawab permasalahan dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini digunakan konsep-teori sistem informasi keperilakuan berdasar pada model partisipasi pemakai dalam pengembangan sistem informasi (*user participation in information system development*) (Baroundi *et al.*, 1986; Olson & Ives, 1980; Harwiick & barki, 1994), dan Model Rantai Teknologi-Ke-Kinerja (*technology-to-performance taks*) (Goodhue, 1995; Goodhue & Thompson, 1995 & Zigurs *et al.*, 1998). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat ditemukenal model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan khususnya pada SKPD.

Berpijak pada uraian-uraian di atas, dalam penelitian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Sejauhmanakah pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan? (2) Sejauhmanakah pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan? (3) Sejauhmanakah pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan?

## Metode

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Populasi penelitian

mencakup seluruh pejabat/kepala dan staf keuangan pengelola keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Variabel ini diukur menggunakan tiga indikator (dimensi) partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem informasi sebagaimana dikembangkan oleh Barki & Hartwik (1994) dalam Jogiyanto (2007), mencakup tanggungjawab, keterlibatan dan persetujuan pengguna dalam pengembangan sistem informasi. Pengukuran tiap-tiap indikator digunakan skala Likert dengan lima rentang interval yaitu sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju (Ghozali, 2001). Kedua, variabel kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator *perceived usefulness* sistem informasi yang mencakup kepentingan (*important*) dan relevansinya (*relevant*) sistem akuntansi keuangan daerah bagi para penggunanya. Pengukuran tiap-tiap indikator digunakan skala Likert dengan lima rentang interval yaitu sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Ketiga adalah variabel kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah. Pengukuran variabel ini digunakan lima item-indikator persepsi pengguna mengenai kesesuaian tugas-teknologi sistem informasi yang dikembangkan Goodhue & Thompson (1995) dalam Jogiyanto (2007), yaitu kualitas, kendala, otorisasi, kemudahan digunakan, ketepatan waktu dan hubungan dengan pengguna-pengguna lainnya. Pengukuran tiap-tiap indikator digunakan skala Likert dengan lima rentang interval yaitu sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Keempat, variabel Penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Pengukuran variabel ini digunakan persepsi pengguna mengenai penggunaan (pemakaian) sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pengukuran tiap-tiap indikator digunakan skala Likert dengan lima rentang interval yaitu sangat setuju, setuju, tidak ada pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

## Hasil dan Pembahasan

Deskripsi partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SIAPD) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keterlibatan, persetujuan dan tanggungjawab kepala (pimpinan), bendahara dan staf keuangan SKPD dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah.

**Tabel 1.** Pengguna Dilibatkan Dalam Pengembangan SIAPD

| Kategori                  | Frekuensi | Persentase |
|---------------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju             | 20        | 38,46      |
| Setuju                    | 22        | 42,31      |
| Tidak Menyatakan Pendapat | 6         | 11,50      |
| Tidak Setuju              | 4         | 7,69       |
| Sangat Tidak Setuju       | 0         | 0          |
| Jumlah                    | 52        | 100        |

Sumber: Data Primer Diolah

Hasil penelitian mengenai pengguna seharusnya dilibatkan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SIAPD), terhadap sejumlah 52 responden pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah yang meliputi kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD

di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Dapat dicermati pada Tabel 1. Selain itu Hasil penelitian terhadap sejumlah responden pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah yang meliputi kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD. Mengenai seharusnya pengguna dimintai persetujuan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah, dapat dicermati pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Pengguna Dimintai Persetujuan dalam Pengembangan SIAPD

| Kategori                  | Frekuensi | Persentase |
|---------------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju             | 11        | 21,15      |
| Setuju                    | 27        | 51,92      |
| Tidak Menyatakan Pendapat | 14        | 26,93      |
| Tidak Setuju              | 0         | 0          |
| Sangat Tidak Setuju       | 0         | 0          |
| Jumlah                    | 52        | 100        |

Sumber: Data primer diolah

Berdasar hasil penelitian mengenai tanggungjawab responden kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD selaku pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam pengembangan SIAPD. Sejumlah responden yang termasuk dalam kategori sangat setuju, setuju, tidak memberikan pendapat, setuju, dan sangat tidak setuju diberi tanggungjawab dalam pengembangan SIAPD dapat dicermati pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Pengguna Diberi Tanggungjawab Dalam Pengembangan SIAPD

| Kategori                  | Frekuensi | Persentase |
|---------------------------|-----------|------------|
| Sangat Setuju             | 11        | 21,15      |
| Setuju                    | 24        | 46,15      |
| Tidak Menyatakan Pendapat | 14        | 26,93      |
| Tidak Setuju              | 3         | 5,77       |
| Sangat Tidak Setuju       | 0         | 0          |
| Jumlah                    | 52        | 100        |

Sumber: Data primer diolah

Identifikasi kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah (SIAPD) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi responden kepala (pimpinan/ketua), bendahara dan staf keuangan SKPD mengenai kepentingan dan relevansi pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk menjamin akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Berdasar hasil penelitian terhadap sejumlah responden kepala, bendahara dan staf SKPD selaku pengguna sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diperoleh informasi bahwa: SIAPD Penting Untuk Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Berdasar hasil penelitian mengenai kepentingan pengembangan SIAPD untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Menurut responden kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD selaku pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah yang termasuk dalam kategori sangat setuju, setuju, tidak membentarkan pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Berdasar hasil penelitian mengenai relevansi SIAPD untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Menurut sejumlah responden kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD selaku pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah. yang termasuk dalam kategori

sangat setuju, setuju, tidak membentarkan pendapat, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Identifikasi kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah (SIAPD) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi responden kepala (pimpinan/ke-tua), bendahara dan staf keuangan SKPD mengenai ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak SIAPD dalam memberikan kemudahan, menjamin keandalan, otorisasi dan kualitas dalam penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Berpijak dari hasil penelitian terhadap sejumlah responden kepala, bendahara dan staf SKPD selaku pengguna sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diperoleh informasi bahwa: Ketersediaan SIAPD Memberi Kemudahan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan; Ketersediaan SIAPD Menjamin Keandalan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan; Ketersediaan SIAPD Menjamin Otorisasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan; Ketersediaan SIAPD Menjamin Kualitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan.

Identifikasi penggunaan SIAPD meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi kepala (pimpinan/ke-tua), bendahara dan staf keuangan SKPD apakah penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak SIAPD meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Berpijak dari hasil penelitian terhadap sejumlah responden kepala, bendahara dan staf SKPD selaku pengguna sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak diperoleh informasi bahwa: Penggunaan SIAPD Meningkatkan Efektivitas Penatausahaan Pengelolaan Keuangan; Penggunaan SIAPD Meningkatkan Efisiensi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan; Penggunaan SIAPD meningkatkan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan.

Dari hasil analisis data menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi linier *standardized* dengan formulasi sebagai berikut:  $Y = 0,59 X_1$ . Hasil output SPSS pada persamaan regresi di atas memberikan nilai *standardized beta* variabel  $X_1$  sebesar  $\beta=0,59$ , dengan  $t$  hitung=5,161 dan signifikan pada sig.=0,000. Berdasar taraf kepercayaan  $\alpha=0,05$  terbukti  $X_1$  secara signifikan berpengaruh positif terhadap  $Y$ . Oleh karenanya hipotesis pertama yang berbunyi “Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan,” diterima.

Selanjutnya hasil analisis data dengan SPSS untuk hipotesis kedua diperoleh persamaan regresi linier berganda *standardized* dengan formulasi sebagai berikut:  $Y = 0,567 X_1 + 0,366 X_2$ . Hasil output SPSS pada persamaan regresi di atas memberikan nilai *standardized beta* variabel  $X_1$  sebesar  $\beta_1=0,567$  dan variabel  $X_2$  sebesar  $\beta_2=0,366$ , dengan nilai  $t_1$ -hitung=5,499 dan signifikan pada sig.= 0,000; nilai  $t_2$ -hitung=3,549 dan signifikan pada sig.=0,000. Berdasar taraf kepercayaan  $\alpha=0,05$ ,  $X_1$  dan  $X_2$  secara signifikan berpengaruh positif terhadap  $Y$ . Oleh karenanya hipotesis kedua: yang berbunyi: “Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan persepsi pengguna mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan,” diterima.

Dari hasil analisis data dengan SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda *standardized* dengan formulasi sebagai berikut:

$$Y = 0,511 X_1 + 0,382 X_2 + e \quad (1)$$

Hasil output SPSS pada persamaan regresi di atas memberikan nilai *standardized beta* variabel  $X_1$  sebesar  $\beta_1=0,511$  dan  $X_2$  sebesar  $\beta_2=0,382$ , dengan nilai  $t_1$ -hitung=4,894 dan signifikan pada sig.= 0,000; serta nilai  $t_2$ -hitung=3,66 dan signifikan pada sig.=0,001. Dengan demikian berdasar taraf kepercayaan  $\alpha=0,05$ ,  $X_1$  dan  $X_2$  secara signifikan berpengaruh positif terhadap  $Y$ . Oleh karenanya hipotesis ketiga yang berbunyi: Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kesesuaian-tugas teknologi sistem akuntansi keuangan

daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, diterima.

Laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan luaran dari sistem akuntansi pemerintahan daerah. Berpijak pada Permendagri No. 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintahan daerah dikoordinasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD). Kepala SKPD bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). PPKD dibantu oleh PPK-SKPD melaksanakan fungsi penata usahaan pengelolaan keuangan SKPD, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Oleh karenanya pengembangan sistem akuntansi pemerintahan seharusnya mengakomodasi kepentingan kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD.

Untuk mengakomodasi kepentingan kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD selaku pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah, perlu dipertimbangkan partisipasi mereka dalam pengembangannya. Berpijak pada hasil-hasil penelitian terdahulu, partisipasi pengguna (*user participation*) dipahami sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan sistem informasi manajemen (Swanson, 1974). Lebih jauh Hartwick & Barki (1994) dalam penelitiannya mengenai pengembangan sistem informasi berbasis teknologi telah menguji suatu kerangka teoritis yang menjelaskan hubungan antara partisipasi pemakai dengan penggunaan sistem (*system uses*) menggunakan tiga dimensi partisipasi pemakai, yaitu tanggungjawab menyeluruh, hubungan pemakai sistem-informasi dan kegiatan diserahkan ke pemakai. Oleh karenanya dalam penelitian pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna ini, partisipasi kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD selaku pengguna sistem akuntansi pemerintahan daerah, didiskripsikan berdasar dimensi-dimensi keterlibatan, persetujuan dan tanggungjawab mereka dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan.

Dari diskripsi variabel-variabel penelitian model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis perilaku pengguna, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris bahwa kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD dilibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak menghendaki dilibatkan, dimintai persetujuan dan tanggungjawab dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna sangat penting dan relevan untuk menjamin akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Ditilik dari kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah, pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna mendukung ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi pemerintahan daerah yang memberikan kemudahan, menjamin keandalan, otorisasi dan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Oleh karenanya pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna menentukan keberhasilan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD.

Berpijak pada hasil uji tiga hipotesis model pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian memberikan bukti secara empiris: Pertama, partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Kedua, partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan. Ketiga, partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kesesuaian-tugas teknologi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pe-

ngelolaan keuangan.

Selanjutnya merujuk model partisipasi pemakai (Barki & Hartwick, 1980 dalam Jogiyanto, 2007) dan model TPC (Goodhue & Thompson, 1995), dalam penelitian ini partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dikonsepsikan akan mendukung kegunaan dan kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris: Pertama, model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan berbasis partisipasi pengguna mendukung kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah menyangkut kepentingan dan relevansinya untuk meningkatkan akuntabilitas penatausahaan keuangan SKPD, dan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Kedua, model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan berbasis partisipasi pengguna mendukung kesesuaian tugas-teknologi sistem akuntansi pemerintahan daerah dalam memberikan kemudahan, menjamin keandalan, otorisasi dan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD, dan berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD.

Berpijak pada uraian-uraian di atas, karakteristik model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah hendaknya mengakomodasi partisipasi pengguna dengan melibatkan, meminta persetujuan dan tanggungjawab kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD. Kedua, pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan kepentingan dan relevansinya untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Ketiga, pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan kesesuaian tugas-teknologinya dengan mengupayakan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung kemudahan dan menjamin keandalan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD. Keempat, pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah hendaknya memperhatikan ketersediaan dan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD.

## Penutup

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di muka, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna menghendaki adanya keterlibatan, persetujuan dan tanggungjawab kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD, (2) Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna mendukung kepentingan dan relevansi sistem akuntansi pemerintahan daerah meningkatkan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD, (3) Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna mendukung ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi pemerintahan daerah memberikan kemudahan, menjamin keandalan, otorisasi dan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD, (4) Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna mendukung penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi pemerintahan daerah meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD, (5) Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, (6) Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerinta-

han daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, (7) Partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kesesuaian tugas teknologi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.

Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, model pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah hendaknya berbasis partisipasi pengguna dengan melibatkan, meminta persetujuan dan tanggungjawab kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD. Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis perilaku pengguna hendaknya mempertimbangkan kepentingan dan relevansi kegunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah bagi kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD untuk meningkatkan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis partisipasi pengguna hendaknya mempertimbangkan kesesuaian tugas-teknologi perangkat keras dan perangkat lunaknya bagi kepala, bendahara dan staf keuangan SKPD, yang memberikan kemudahan, menjamin keandalan, otorisasi dan kualitas penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

#### Daftar Pustaka

- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Bodnar in George and, S.W. Hopwood. 1995. Accounting Information System, Equation Modeling in MIS Reserarch: A Note of Coution. *Management Information System Quarterly*, 21 (3)
- Ghozali, I. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Goodhue dan R.L. Thompson. 1995. Ask-Technology Fit and Individual Performance. *MIS Quarterly*, Juni, 213-236
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Scotss, G.M. (Diterjemahkan oleh Budiman, Ahmad Nashir). 1999. *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada
- Vennkatraman, N. dan J. E. Prescott. 1990. Environment-Strategy Coalignment: an Empirical Test of Its Performance Implications. *Strategic Management Journal*, Vol. 11, 1-23